

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DI DESA GUNUNGSARI DAN DESA TANJUNGSARI DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

Ari Kusumah Wardani^{1*}, Mardi Saputra², Nia Kurniasih³, Indah Isneni Putri⁴
^{1,2,3,4} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : arikw@unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas berbagai sistem informasi dalam meningkatkan transparansi publik. Studi ini mengeksplorasi bagaimana implementasi sistem informasi yang berbeda, seperti terdapat dalam aplikasi berbasis web, serta kecepatan distribusi informasi kepada masyarakat. Dalam Sistem Informasi Desa (SID) menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparansi, akuntansi, dan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks Desa Gunungsari dan Desa Tanjungsari di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi, pendekatan, dan hasil dari penggunaan SID. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya SID berbasis web di Desa Tanjungsari lebih efektif dalam hal kemudahan akses dan kelengkapan informasi. Namun, SID di Desa Gunungsari adanya keterbatasan transparansi informasi hal ini yang membedakan diantara kedua Desa tersebut.

Kata Kunci : SID, Transparansi Publik, Efektivitas Implementasi

ABSTRACT

This research aims to compare the effectiveness of various information systems in increasing public transparency. This study explores how different information systems are implemented, such as those found in web-based applications, as well as the speed of distribution of information to the public. The Village Information System (SID) is an important instrument in supporting village governance that is transparent, accounting and based on information technology. In the context of Gunungsari Village and Tanjungsari Village in Sadananya District, Ciamis Regency, there are significant differences in the implementation, approach and results of using SID. The method used in this research is qualitative with data collection techniques using observation, interviews and literature study techniques. The results of this research show that web-based SID in Tanjungsari Village is more effective in terms of ease of access and completeness of information. However, the SID in Gunungsari Village has limited transparency of information, this is what differentiates the two villages.

Keywords: SID, Public Transparency, Implementation Effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut setiap negara untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut bertujuan agar tidak tertinggal dari negara lain, khususnya di negara Indonesia. Berbagai program teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi.

Kemajuan teknologi informasi sangat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang semakin luas jangkauannya, membantu para pelaku pelayanan publik untuk mengambil keputusan. Penggunaan teknologi informasi kini juga dimanfaatkan dalam kegiatan administrasi, pelayanan, pengelolaan data kepegawaian, maupun transparansi informasi publik. Di bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal sebagai e-government. Menurut Suaedi (2010:54), e-government ialah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara umum.

Menurut Derry (2019:1), pengembangan e-government di Indonesia didukung oleh regulasi yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi

Elektronik dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Beberapa regulasi tersebut menuntut agar setiap instansi publik untuk mengimplementasikan e-government dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang publik yang baik, yakni tingkat pusat, daerah, maupun desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Guna menjawab berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa, maka dalam penerapan e-government desa memerlukan suatu perencanaan yang matang. Hal tersebut mendasari adanya inisiatif dari pemerintah tingkat desa untuk menjalankan Sistem Informasi Desa. Pernyataan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mengembangkan sistem informasi desanya. Harapan baru muncul setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut membawa harapan baru, yakni untuk pembangunan tingkat desa. Pada dasarnya, pembangunan tingkat desa membutuhkan suatu sistem informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting bagi sebuah desa.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan inovasi penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah berbagai aspek administrasi pemerintahan desa, mulai dari

pencatatan data kependudukan, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya dan keuangan desa. Dalam implementasinya, SID bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan pelayanan pemerintah, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa Gunungsari dan Desa Tanjungsari, yang keduanya terletak di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, telah mengadopsi SID dengan pendekatan dan tingkat implementasi yang berbeda. Implementasi SID di kedua desa ini menggambarkan bagaimana teknologi informasi dapat menjadi katalisator perubahan dalam pemerintahan desa. Namun, keberhasilan SID juga bergantung pada faktor lain, seperti dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah desa untuk terus berinovasi. Dengan pemanfaatan SID yang optimal, desa-desa tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai ujung tombak pembangunan berbasis masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Transparansi Informasi Publik

Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi memiliki tiga

karakteristik, Mardiasmo (2018:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut : a) Informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. b) Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. c) Pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

2. Sistem Informasi dalam Pemerintahan Desa

Sistem informasi dalam pemerintahan desa adalah alat strategis yang membantu dalam pengelolaan data dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Teknologi ini melibatkan berbagai platform digital, seperti website desa, aplikasi mobile, dan media sosial, untuk mendukung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Suryani et al., 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi desa dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat (Rahman, 2021).

3. Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas sistem informasi dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti kemudahan akses, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna (Delone & McLean, 2003). Studi oleh Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa desa yang memiliki sistem informasi yang terintegrasi cenderung lebih mampu menyediakan

informasi secara cepat dan akurat dibandingkan desa yang masih bergantung pada metode manual.

4. Peran Sistem Informasi dalam Meningkatkan Transparansi

Sistem informasi yang baik dapat memperkuat transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Nugroho (2018), penggunaan teknologi informasi di tingkat desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam aspek pengawasan anggaran dan program pembangunan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan terpercaya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis perbandingan efektivitas sistem informasi di Desa Gunungsari dan Tanjungsari dalam meningkatkan transparansi informasi publik.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi dan penggunaan sistem informasi di kedua desa, termasuk fasilitas pendukung, proses operasional, dan interaksi antara perangkat desa dan masyarakat.
2. Wawancara, Wawancara mendalam dilakukan dengan perangkat desa yang mengelola sistem informasi, serta warga sebagai pengguna. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan evaluasi terkait efektivitas sistem informasi dalam meningkatkan transparansi.
3. Studi Pustaka, Studi pustaka dilakukan

dengan meninjau literatur, dokumen, dan regulasi yang relevan, seperti laporan pemerintah desa, kebijakan keterbukaan informasi, dan penelitian sebelumnya terkait sistem informasi desa.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam efektivitas sistem informasi di kedua desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keamanan Data

Keamanan data merupakan aspek kritis dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), terutama untuk melindungi informasi yang bersifat sensitif dan menjaga kepercayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara, mekanisme autentikasi dua faktor yang diterapkan di kedua desa mencakup penggunaan *username*, *password*, dan kode OTP. Langkah ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data.

Penerapan autentikasi dua faktor adalah salah satu praktik terbaik dalam keamanan informasi karena mengurangi risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang. Namun, efektivitas sistem ini juga bergantung pada :

- a) Pelatihan Perangkat Desa : Petugas yang mengelola SID harus dilatih untuk memahami risiko keamanan, seperti pengelolaan kredensial dan identifikasi serangan siber.
- b) Pencegahan Kebocoran Data : Selain autentikasi, perlu adanya langkah tambahan, seperti enkripsi data, pencatatan aktivitas (*log monitoring*), dan pembatasan akses berdasarkan tugas atau fungsi.

Desa yang memiliki sistem

keamanan yang kuat tidak hanya melindungi data, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi yang ditawarkan oleh SID.

2. Waktu

Frekuensi audit dan pembaruan data merupakan indikator penting dari efektivitas pengelolaan SID. Desa Gunungsari melakukan pembaruan secara rutin setiap enam bulan, sementara Desa Tanjungsari bersifat lebih fleksibel dengan tiga kali audit per tahun atau saat terjadi pembaruan data penting.

- a) Keunggulan Rutinitas (Desa Gunungsari) : Pembaruan yang terjadwal memastikan konsistensi data dan pengelolaan informasi yang lebih terstruktur. Dengan jadwal tetap, pemerintah desa dapat memonitor perkembangan informasi secara sistematis, mendukung akuntabilitas yang lebih tinggi.
- b) Keunggulan Fleksibilitas (Desa Tanjungsari) : Dengan jadwal yang lebih sering, Desa Tanjungsari memiliki keunggulan dalam merespons kebutuhan mendadak untuk pembaruan data. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menerima informasi yang lebih relevan dan terkini.

Namun, fleksibilitas tanpa sistem pendukung yang memadai dapat menyebabkan ketidakkonsistenan, sementara rutinitas tanpa respons cepat terhadap perubahan dapat membuat sistem terasa kaku. Oleh karena itu, pendekatan ideal adalah mengombinasikan rutinitas

dengan fleksibilitas berdasarkan kebutuhan, seperti menerapkan pembaruan rutin tetapi tetap responsif terhadap situasi tertentu.

3. Ketelitian

Ketelitian adalah suatu sikap atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh akurat dan bebas dari kesalahan. Dalam konteks sistem informasi, ketelitian mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan data yang benar, pemrosesan data yang tepat, hingga penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Terdapat perbedaan antara lain :

- a) Desa Gunungsari : Seringkali ditemukan kesalahan penulisan yang dapat menghambat akurasi data dan proses pengambilan keputusan.
- b) Desa Tanjungsari : Telah berhasil menerapkan standar ketelitian yang lebih tinggi dalam pengelolaan data, sehingga kesalahan penulisan jarang terjadi.

Perbedaan ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam prosedur pengendalian mutu data dan tingkat kesadaran akan pentingnya ketelitian di antara kedua desa tersebut.

4. Variasi Laporan atau out put

Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi yang terdapat pada web di Desa Gunungsari dan Desa Tanjungsari. Berikut beberapa informasi data yang menjadi perbedaan pada masing-masing desa.

Kelengkapan Filtur Sistem Informasi Desa

No	Desa Gunungsari	Desa Tanjungsari
1.	Statistik	Statistik
	✓ Pendidikan	✓ Pendidikan

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jenis kelamin dan usia ✓ Lahan ✓ Sarana Prasarana ✓ APBDES ✓ Sejarah ✓ Perangkat Desa ✓ Wilayah ✓ Potensi Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jenis kelamin dan usia ✓ Pertamabahan penduduk pertahun ✓ Peristiwa kelahiran pertahun ✓ Peristiwa kematian pertahun ✓ Pekerjaan ✓ APBDES ✓ Lahan ✓ Sarana Prasarana ✓ Sejarah ✓ PERDES ✓ Wilayah ✓ Jadwal pelaksanaan program sampai oktober 2025 ✓ Prestasi
---	---

5. Relevansi

Relevansi adalah suatu hubungan, kaitan, atau kesesuaian antara satu hal dengan hal lainnya. Sederhananya, sesuatu dikatakan relevan jika memiliki hubungan yang erat atau signifikan dengan topik atau masalah yang sedang dibahas. Relevansi dalam SID mengacu pada sejauh mana informasi yang terkandung di dalam SID tersebut sesuai, berguna, dan relevan dengan kebutuhan serta konteks pengguna. Sederhananya, informasi yang relevan adalah informasi yang tepat pada waktu yang tepat dan dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang sedang dihadapi. Manfaat dari adanya Sistem Informasi Desa (SID) meliputi :

1. Meningkatkan Transparansi

Ialah membuat sesuatu menjadi lebih jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh semua orang.

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat: Menyediakan semua data dan fakta yang relevan, tanpa ada yang disembunyikan atau diputarbalikkan.
- b. Membuka akses publik: Memungkinkan siapa saja untuk

melihat dan mengakses informasi tersebut, baik itu data, dokumen, atau keputusan.

- c. Menjelaskan proses kerja: Menunjukkan secara jelas bagaimana suatu keputusan diambil atau bagaimana suatu pekerjaan dilakukan.
- d. Menerima kritik dan masukan: Bersedia mendengarkan pendapat dan masukan dari orang lain, baik itu dari masyarakat umum, media, atau pihak lain yang berkepentingan.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Merupakan suatu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3. Mempermudah Akses Informasi Warga

Upaya untuk membuat informasi yang penting dan relevan bagi masyarakat menjadi mudah diakses oleh semua

kalangan. Ini mencakup berbagai jenis informasi, mulai dari informasi pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga informasi tentang layanan publik lainnya.

4. Pengalokasian Data yang Lebih Akurat

Mengacu pada proses penempatan data ke dalam kategori atau kelompok yang tepat, sehingga data tersebut dapat dianalisis, diinterpretasi, dan dimanfaatkan secara efektif. Keakuratan dalam pengalokasian data sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas hasil analisis dan keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan teori efektivitas menurut Bodnar (dalam Evayani, 2018: 105), dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem informasi di Desa Gunungsari belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah pelaporan keuangan desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang tidak sepenuhnya transparan. Pelaporan tersebut dilakukan melalui platform yang berbeda, yaitu menggunakan website Panda SID, sehingga menimbulkan kesulitan akses bagi masyarakat karena alur informasi yang terlalu rumit dan kurang terintegrasi.

Sebaliknya, efektivitas sistem informasi di Desa Tanjungsari telah

berjalan dengan lebih baik dan optimal. Hal ini tercermin dari penyampaian informasi yang lebih lengkap, rinci, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem informasi desa di Tanjungsari mampu memberikan berbagai jenis informasi secara terstruktur, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan aksesibilitas informasi terpenuhi dengan lebih baik. Dengan demikian, Desa Tanjungsari dapat menjadi contoh implementasi sistem informasi desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aulia, R., & Kurniawan, A. (2021). Perbandingan Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Transparansi Publik: Studi Kasus pada Beberapa Desa di Jawa Timur. *Jurnal Sistem Informasi*, 12(2), 123-135.
- Nugraha, R., & Setyawan, D. (2021). Analisis efektivitas sistem informasi desa terhadap transparansi publik. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 12(3), 45-56. <https://doi.org/10.xxxx/yyyy>
- Rasyid, F., & Wijayanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Desa terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 21(2), 98-110.
- Sari, M., & Pratama, H. (2020). Pengaruh implementasi e-government terhadap tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(1), 67-78.